



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

THE WORLD HALAL KITCHENS

Achmad Muchaddam Fahham

Peneliti Madya

achmad.fahham@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia berpotensi menjadi *the World Halal Kitchens* atau Dapur Halal Global. Di luar Indonesia, Thailand adalah negara yang telah lebih dulu mengklaim dirinya sebagai *the World Halal Kitchens* dengan proyek kawasan industri halal, seperti yang telah dilakukan di Songkla dan kota-kota kawasan wisata utama lainnya seperti Phuket dan Chiang Mai. Pertanyaannya adalah apa langkah yang perlu dilakukan agar Indonesia dapat menjadi Dapur Halal Global? Langkah yang perlu dilakukan adalah membangun ekosistem halal, berupa suatu sistem hubungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara satu aktivitas produksi halal dengan aktivitas produksi halal lainnya yang membentuk lingkungan halal. Ekosistem halal juga bisa dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur yang mendukung dalam produksi halal atau merupakan mata rantai aktivitas produksi halal yang saling berhubungan dalam suatu lingkungan yang saling memengaruhi. Ekosistem ini dibentuk dari *supply chain* yang menghubungkan satu titik ke titik suplai lainnya dan memiliki nilai/value sehingga merupakan satu mata rantai yang terhubung satu dengan lainnya yang membentuk nilai (*value*).

Pembentukan ekosistem halal dapat dimulai dari pembentukan ekosistem kuliner halal dalam negeri. Mengingat sektor makanan dan minuman menyumbang 36,4% dari total PDB nasional. Pembentukan ekosistem kuliner halal pada sebuah kawasan yang terintegrasi secara *end to end* dipandang sebagai salah satu langkah penting untuk menguatkan eksistensi produk halal dalam negeri, baik dari segi pendampingan pelaku usaha, peningkatan kualitas produksi, maupun pemasaran dengan cakupan konsumen yang lebih luas. Sektor makanan dan minuman yang diharapkan menjadi produk kuliner halal dalam negeri tentu saja memerlukan dukungan pemerintah agar produk kuliner tersebut tersertifikasi halal.

Pemerintah memberi dukungan yang cukup besar terhadap pengembangan industri halal, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai amanat dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri halal. Selain itu, pemerintah juga telah mendorong akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Para pelaku UMK akan mendapat fasilitasi pengurusan proses sertifikasi halal oleh pemerintah melalui alokasi anggaran yang disiapkan, baik anggaran dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN dan swasta. Pemerintah juga meluncurkan program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) dan pemberian fasilitasi halal UMK melalui beberapa kementerian/lembaga. Diharapkan 80% UMK makanan dan minuman yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memiliki sertifikasi halal.

Atensi DPR

Akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) perlu terus ditingkatkan agar target 80% UMK makanan dan minuman memiliki sertifikat halal dapat dicapai. Komisi VIII DPR perlu mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) makanan dan minuman di berbagai wilayah di Indonesia tentang urgensi sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman mereka. Kendala yang selama ini dialami oleh pelaku usaha makanan dan minuman yang mengajukan diri untuk memperoleh sertifikat halal harus bisa diatasi. Sosialisasi kelembagaan BPJPH sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal juga harus terus dilakukan, sebab masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui sepenuhnya wewenang BPJPH dan wewenang Majelis Ulama Indonesia dalam konteks sertifikasi produk halal.

Sumber

antaranews.com, 11 Februari 2022;
bisnis.tempo.co, 11 Februari 2022;
jurnalislam.com, 14 Februari 2022;
nusantara.rmol.id, 11 Februari 2022;
republika.co.id, 12 Februari 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Rasbin
Edmira Rivani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.